

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Indonesia terkenal dengan reputasinya sebagai salah satu negeri yang sangat dinamis, dengan kapal-kapal layarnya mampu melakukan ekspedisi penjelajahan samudra yang sangat membanggakan, dari Laut China ke Madagaskar sampai kepantai timur Afrika, dan dari padang gurun Persia sampai ke pulau-pulau di Timur Pasifik. Sebelum kedatangan para pedagang dari Barat, praktis seluruh pelayaran dan perdagangan maritim di timur jauh berada di tangan orang-orang Indonesia.

Masyarakat Indonesia, sepanjang sejarahnya pernah diketahui mencapai zaman keemasannya, ketika bakat-bakat dan karakter Indonesia mewujudkan dirinya, ketika cita-cita tentang Indonesia yang bersatu di bawah satu pemerintahan atas seluruh wilayah yang didiami oleh ras Indonesia, termasuk ras di semenanjung Melayu dan Filipina, berhasil dicapai. Inilah zaman keemasan Kerajaan Majapahit yang ada pada abad-14 dan 15 memainkan peran penting dalam kehidupan politik di Asia Timur. Dewasa ini di beberapa tempat di Indonesia masih ditemukan sejumlah jejak peninggalan era kejayaan masa itu (Pane, 2015: 32).

Tetapi kondisi itu berbeda ketika Indonesia dikenal sebagai negeri koloni yang dijajah dan dieksploitasi. Perjuangan masyarakat Indonesia

adalah bukti bahwa begitu berat rakyat dalam mencapai sebuah kemerdekaan dan membebaskan diri dari kekejaman penindasan rezim kapitalisme kolonial. Dimulai ketika penjajahan bangsa Eropa mulai memasuki tanah Indonesia, rakyat pada saat itu hidup tertindas atas perlakuan penjajah yang ingin menguasai kekayaan Indonesia. Rakyat Indonesia hidup tertindas di Tanah Airnya sendiri. Perjuangan yang begitu hebat kemudian membawa rakyat Indonesia ke depan gerbang kemerdekaan.

Pada awal abad ke-20 timbul kesadaran bahwa perjuangan bersifat kedaerahan terbukti tak cukup kuat mengusir penjajah. Semangat kebangkitan negara-negara di Asia dalam melawan imperialisme, menjalar ke Indonesia dan memicu kebangkitan kesadaran nasionalisme. Di Tanah Air bermunculan pionir organisasi-organisasi kebangsaan. Konsepsi untuk mengorganisasikan perjuangan berdasarkan prinsip kebangsaan dan persatuan, mulai menjadi konsepsi organisasi-organisasi politik. Sukarno-Hatta ketika mulai terjun ke kancah pergerakan nasional adalah senjata berupa ide. Sukarno menyebut strateginya dengan istilah menyusun kekuatan, yaitu penyusunan dan penggunaan tenaga semangat, tenaga kemauan, tenaga roh, tenaga nyawa. Penyusunan dan penggunaan tenaga tersebut terus disuburkan hingga menjadi sebuah kekuatan besar yang bangkit bergerak puluhan tahun kemudian, saat revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 (Jonge, 2015: 13).

Pergerakan nasional mengalami kematangan yang timbul dari rasa kebangsaan untuk melakukan perubahan bagi rakyat Indonesia yaitu melalui cita-cita bangsa Indonesia. Dengan hal tersebut, dengan sendirinya menimbulkan berbagai pemikiran dan gagasan tentang bagaimana menjadi suatu bangsa yang besar, merdeka, berdaulat, dan memiliki pemerintah sendiri. Kemerdekaan yang diperoleh rakyat Indonesia tentu saja tidak bisa dilepaskan dari jasa perjuangan para pahlawan bangsa. Selama ini orang yang dianggap paling berjasa dalam kemerdekaan Indonesia adalah *founding fathers* yaitu Sukarno dan Hatta yang pada saat itu membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia sekaligus menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama untuk Indonesia.

Dua tokoh Proklamator kemerdekaan bangsa ini, Sukarno dan Hatta mempunyai pandangan masing-masing dalam pemikiran dan gagasannya mengenai suatu bangsa yang merdeka. Pergulatan pemikiran, perjuangan Sukarno-Hatta sangatlah panjang dan berliku-liku, yang harus dilacak mulai dari asal dan tempat kelahirannya. Pengaruh lingkungan budaya Jawa ikut mewarnai kepribadian Sukarno, sedangkan budaya Sumatra Barat ikut mewarnai kepribadian Hatta. Proses perjuangan dan perkembangan pemikiran Sukarno-Hatta selanjutnya sangat dipengaruhi oleh pergulatan pemikiran, pergaulan, dan pendidikannya. Di satu sisi, Sukarno lebih menekankan kepada persatuan dan kebesaran bangsa yang dapat mengobarkan semangat kebangsaan, pada sisi lain Hatta cenderung menekankan tentang kemakmuran dan demokrasi bagi rakyat Indonesia.

Kedua pemikiran tokoh tersebut mempunyai sudut pandang yang berbeda, tetapi pada intinya pemikiran tersebut memiliki banyak kesamaan, dan perbedaan yang saling melengkapi.

Perjuangan bangsa Indonesia pada periode tahun 1945-1949 merupakan suatu tujuan kemauan dan semangat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia di mata dunia. Berbagai tekanan terhadap Indonesia menjadikan para tokoh pemimpin bangsa ketika menjadi kritis terhadap berbagai persoalan untuk perlu mengambil suatu tindakan strategis. Pemikiran kebangsaan yang berkembang telah memperlihatkan kepada kita bagaimana pemikiran politik Indonesia pada periode tersebut dalam usahanya menciptakan kedaulatan bangsa. Tidak dapat dimungkiri bahwa pada tahun 1945-1949 pemikiran-pemikiran politik Indonesia banyak terwakilkan oleh orang-orang yang *western oriented* khususnya Eropa: Hatta dan Syahrir (Purwaningsih, 2009: 3)

Banyak para pemikir politik yang mempunyai pandangan tentang Indonesia yang berusaha meletakkan pemikirannya untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia sebut saja Sukarno, Tan Malaka, Syahrir dan di antaranya adalah Mohammad Hatta. Sosok pemimpin Indonesia yang berintegritas tinggi, seorang yang mempunyai pribadi kuat dalam karakter kepribadiannya, sosok pemimpin yang disiplin dan jujur, negarawan yang demokrat, muslim yang saleh, dan ekonom yang berideologi kerakyatan yang tak lain adalah Mohammad Hatta salah satu sosok yang paling menonjol. Kepribadiannya terdidik dari keluarga dan lingkungan serta

pengalaman hidupnya sedari kecil serta dimatangkan oleh ilmu pengetahuan yang diperolehnya menjadikan ia sebagai seorang yang mempunyai budi pekerti yang anggun, disiplin, pekerja yang gigih dan menempatkannya sebagai pejuang dengan politiknya serta pengetahuan intelektualnya yang banyak disegani oleh siapapun. Sungguh pun watak keras Hatta dalam sikap politisnya yang sempat membuat kecewa para angkatan muda hal ini disebabkan karena luputnya mereka dalam meyakinkan Hatta supaya tidak melepaskan jabatan sebagai Wakil Presiden yang ketika itu dalam suasana gejolak politik dengan Bung Karno, Hatta tetap menunjukkan moral hubungan persaudaraan antara keduanya yang tidak pernah putus (Maarif, 1999: 1).

Dalam Perang Pasifik jelas bahwa hal itu membuat perubahan pada jalan hidup Hatta. Ketika pendudukan Jepang tahun (1942-1945) dan keterlibatan Jepang dalam Perang Pasifik. Oleh karenanya diajak bekerja sama oleh pemerintah Jepang. Dalam hal untuk bisa bekerja sama Hatta tidak bisa menolaknya, setelah penyerahan pihak Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 dari Jendral Ter Poorten kepada Jendral Hithosi Imamura di Kalijati Jawa Barat. Kesempatan ini untuk menyusun kekuatan rakyat, dengan bekerja sama ini dapat pula ia dan para pemimpin pergerakan nasional lain berusaha meringankan penderitaan rakyat yang sedang tertekan (Noer, 1991: 185-186).

Hatta yakin bahwa Jepang akan kalah, oleh karena itu kemudian menjadi perlu bagi Mohammad Hatta untuk menyusun sebuah kekuatan

rakyat. Dalam hal ini beliau percaya dan yakin bahwa adanya Perang Pasifik akan memberi kesempatan bagi negeri-negeri jajahan di bagian dunia ini untuk bisa melepaskan dirinya dari tangan atau cengkraman penjajahan tak terkecuali begitupun yang dialami oleh bangsa Indonesia. Dalam benak Hatta sendiri tidak yakin jika Jepang akan menang melawan sekutu atau Amerika yang merupakan negara industri terbesar yang begitu hebatnya. Pada masa perang itu bagi Hatta ini adalah kesempatan yang harus benar-benar bisa dipersiapkan untuk dipergunakan sebagai kekuatan dan tenaga perjuangan rakyat, dengan harapan siap dan sanggup untuk menanggung kemerdekaan apabila Jepang sudah kalah (Noer, 1972: 19).

Pada bulan Agustus 1945 ketika Jepang kalah dari sekutu, timbulah dorongan dari rakyat untuk bisa merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Dengan teguh pendirian Hatta yang selalu berfikir ke depan mengatakan bahwa Jepang yang sudah kalah bukan menjadi sebuah permasalahan lagi. Yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk melawan tentara sekutu yang sudah jelas mereka akan mengulang kembali untuk mengembalikan kekuasaan Pemerintah Belanda di Indonesia. Maka dari itu dalam proses menuju Indonesia Merdeka juga diperlukan kemampuan administratif dan keadaan diplomasi di meja perundingan internasional. Dan kemampuan seperti ini merupakan keahlian Hatta. Pada masanya, penyatuan Sukarno-Hatta ini memang sangat diperlukan oleh rakyat Indonesia. Kerja sama solid antara Sukarno-Hatta dalam mengatur strategi menuju kemerdekaan sejak

tahun 1920-an, membuat keduanya menjadi simbol persatuan bangsa (Jonge, 2015: 16).

Pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah semua persiapan yang sudah dilakukan secara matang tibalah saatnya Kemerdekaan Indonesia dicapai dan diproklamasikan oleh Sukarno dan Mohammad Hatta, di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta dengan diiringi oleh lagu Indonesia Raya (Noer, 1998; 252). Setelah kejadian tersebut Hatta menjadi sosok yang aktif menjadi pemimpin negara Republik Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden, meskipun beban yang ia tanggung pada tahun 1948-1949 dalam situasi kondisi yang membuat beban Hatta berat karena harus merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri.

Pada tahun 1950 saat Konferensi Meja Bundar yang merupakan salah satu konferensi politik yang diperjuangkan berhasil mencapai tujuan yaitu dengan diakuinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat terdiri atas bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Kemudian Hatta menjabat menjadi Perdana Menteri untuk pertama dan terakhir pada waktu Republik Indonesia Serikat berdiri. Dilanjutkan kembali pasca Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk sesuai dengan amanat proklamasi Hatta terpilih sebagai Wakil Presiden oleh parlemen.

Mohammad Hatta dikenal sebagai tokoh yang memegang teguh prinsip yang diyakininya. Ia selalu memperjuangkan status Indonesia sebagai negara yang mengakomodasikan kepentingan segala golongan, bukan hanya segelintir orang atau golongan tertentu. Ia bahkan rela

meletakkan jabatannya demi mempertahankan kesatuan bangsa. Latar belakang pengetahuannya yang amat mendalam tentang ekonomi dan ketatanegaraan mengantarkan dirinya terlibat aktif dalam berbagai peristiwa penting dalam proses pembentukan *nation state* Indonesia. Ia pernah terlibat aktif dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar (UUD) pada tahun 1945, penyusunan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1945, maupun penyusunan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950.

Hatta adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan nama “Indonesia” dalam tulisan yang diterbitkan oleh *De Socialist* pada Desember 1928. Dalam berbagai tulisannya, terlihat bahwa ia merupakan tokoh yang dekat dengan rakyat, tetap menjunjung tinggi demokrasi, dan juga sangat memerhatikan hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan kebangsaan. Ia berfikir bahwa pendidikan juga berperan penting dalam membangun karakter kebangsaan. Menurutnya, “Ilmu dapat dipelajari oleh segala orang yang cerdas dan tajam otaknya, tetapi manusia yang berkarakter tidak diperoleh begitu saja, pangkal segala pendidikan karakter adalah cinta akan kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar” (Alfarizi, 2009: 97-98).

Hatta dalam kiprahnya di dunia politik maupun sebagai pejabat negara selalu menekankan pentingnya demokrasi ekonomi kerakyatan yang berbasis pada koperasi. Ditambah lagi kepribadian Hatta yang merupakan sosok pemikir yang multi-dimensi, karena cakupan pemikirannya yang

amat beragam, mulai dari soal kebangsaan, pendidikan, ekonomi, filsafat, hingga soal hukum tata negara. Mohammad Hatta memberikan konsepsi kedaulatan rakyat pada konsepsi demokrasinya yang mengandung demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan sosial (Alfarizi, 2009: 119).

Indonesia adalah negara demokratis, yang menjadi pertanyaan adalah demokrasi yang seperti apa. Itulah yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Dalam proses pemaknaan demokrasi sering kali terjebak dalam pemaknaan yang asal atau kurang ilmiah. Kenyataannya itu sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut Hatta dalam karangannya, rakyat terlalu mentah-mentah dalam memahami demokrasi Barat, Hatta juga menolak demokrasi yang bertumpu pada kepentingan feodal (Alfarizi, 2009: 105). Seperti yang diketahui, perspektif transisi menuju demokrasi mendominasi debat interpretasi perubahan politik di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru (Budiman, Hately and Kingsburry 1999; and May 1999). Perspektif semacam ini menggambarkan proses kejatuhan Soeharto dalam kerangka demokratisasi yang melibatkan tarik menarik kekuatan di antara para elite yang menentukan sifat perubahan politik. Kejatuhan Soeharto mewariskan kekacauan, krisis ekonomi menciptakan peluang bagi reformasi pasar. Kenyataannya memperkuat posisi kelompok teknokrat liberal dan agen-agen internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk melancarkan reformasi ekonomi yang bersifat radikal berdasarkan tuntunan neoliberalisme. Sementara munculnya elite baru justru tidak melemahkan posisi unsur-unsur dalam oligarki lama,

terutama militer, teknokrat liberal, sebaliknya yang terjadi adalah kekuatan-kekuatan lama ikut dilibatkan dalam reformasi kekuasaan oligarki baru.

Proses pembentukan oligarki baru dibarengi oleh upaya reformasi politik yang mencakup amandemen 1945, penghapusan UU Politik yang menindas, pembebasan sejumlah tahanan politik, peningkatan kebebasan pers, pembaharuan sistem pemilu dan kepartaian dan penarikan mundur militer dari parlemen (Hiariej, 2004: 57-58). Demokrasi yang berkembang setelah 19 tahun reformasi Indonesia, idealnya Indonesia sudah mencapai demokratisasi yang mapan. Sejauh ini hampir semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik, namun realita dari pemerintah yang dalam perkembangannya terlihat semakin jauh dari demokrasi yang sebenarnya.

Permasalahan-permasalahan lain yang timbul adalah soal kebangsaan dan hak asasi manusia (HAM). Kemenangan ideologi kapitalisme dan demokrasi liberal atas dua saingan utamanya komunis dan nasionalisme fasis yang menjadikan tiap-tiap negara terintegrasi dalam ekonomi pasar satu sama lain dan semakin mengalami ketergantungan ekonomi. Neoliberalisme dalam peningkatan terwujudnya perdagangan bebas, aliran bebas untuk bermodal dan kebebasan investasi. Dalam perkembangan dan pengalaman politik global kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Namun ketegangan ideologis lantas tidak menjadikan dunia aman, karena hal tersebut hanya mengurangi ketegangan di tingkat global, tidak menyelesaikan konflik-konflik yang secara tradisional yang memiliki bibit-bibit konflik. Hakikat konflik telah berubah, konflik bukan

hanya antar-negara melainkan terjadi dalam suatu negara (Hiariej, 2004: 262).

Masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini semakin kompleks dan berat. Hal ini membuat dialog nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif. Indonesia merupakan bangsa yang besar terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, agama, dan budaya yang tersebar luas di berbagai pulau. Permasalahan yang kemudian timbul bukan hanya persoalan sensitif seperti ketimpangan pendapatan, kesenjangan sosial, lonjakan harga kebutuhan saja, tetapi juga kemrosotan sikap dan persatuan, kebangsaan ini menjadi tidak bermakna ketika kebinekaan yang ada tidak menjadi bagian diri dari setiap anak bangsa dan akan memunculkan sikap kesekretarian, yang akan terus menggerus nasionalisme.

(<https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/01/23dialog-nasional-menylesaikan-masalah-bangsa/>). Diakses pada 20 April 2017, pukul 19.30 wib.

Dalam bidang politik, berbagai lembaga politik yang ada, bukannya menjadi penyangga tegaknya kedaulatan politik, justru menjadi pintu masuk intervensi asing. Akibatnya, musuh Indonesia tidak hanya berwujud radikalisme dan juga terorisme tetapi juga neoliberalisme. Produk politik, seperti peraturan perundang-undangan, yang seharusnya dibuat untuk melembagakan kedaulatan politik justru berubah menjadi sarana legalisasi, pengesahan, penghalalan neokolonialisme alias "penjajahan gaya baru". Liberalisme itulah menjadi jalan bagi kaum kapitalis untuk memanfaatkan semua sumber daya demi kepentingan pribadi yang menumbuhkan gaya hidup konsumerisme dan hedonisme yang akhirnya banyak orang yang terjebak dalam gaya hidup tersebut memilih jalan pintas untuk korupsi.

(<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/09/o8ikgx282-radikalisme-terorisme-dan-neoliberalisme-adalah-musuh-indonesia>). Diakses pada tanggal 20 April 2017, pukul 20.00 wib.

Terjadinya banyak konflik kekerasan, perampasan, tidak diakuinya hak dan banyak persoalan-persoalan masyarakat Indonesia yang berakhir pada tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sejarah mencatat bahwa berbagai kerusuhan mulai dari Situbondo, Ambon, Sampit, Riau,

Papua dll. Selain itu, bangsa ini juga mengalami konflik yang akut berkenaan dengan keinginan sekelompok masyarakat di Papua (Irian Jaya) dan Aceh yang ingin memisahkan diri (Hiariej, 2004: 263). Dalam dunia politik sungguh pun terjadi demikian, perpecahan dalam partai politik dan perpecahan di dalam DPR, bahkan banyak pejabat yang tersandung kasus asusila dan praktik KKN. Bagi masyarakat yang ingin belajar politik pada kenyataannya hanya dikotori oleh oknum-oknum yang berkepentingan. Ini menjadikan rakyat yang bergerak dalam politik secara keseluruhan hampir lupa akan tujuan mereka dalam berpolitik. Ketika Indonesia merdeka banyak tokoh pemikir politik seperti Syahrir, Tan Malaka, atau Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya. Peneliti menguraikan bahwa kenapa pemikiran politik Hatta yang menjadi pilihan penelitian, hal itu disebabkan karena konsep dan pandangan Hatta yang cemerlang tentang demokrasi, kebangsaan dan hak asasi manusia yang sangat sesuai dengan kondisi Indonesia, dimana pemerintah sendiri belum juga mewujudkan apa yang dahulu sudah digagas oleh Hatta. Pemikiran Hatta tersebut saling berkaitan dan menjadi simbol perjuangannya selama hidupnya, pada kenyataannya berperan dalam membentuk karakter bangsa Indonesia, bahkan teori-teorinya masih menjadi bahan renungan pada masa sekarang. Beranjak dari kenyataan diatas penulis bertujuan untuk menganalisa relevansi pemikiran politik Mohammad Hatta tentang Demokrasi, Kebangsaan dan HAM dengan kondisi pasca reformasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat ditarik sebuah perumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Pemikiran Politik Muhammad Hatta Tentang Konsep Demokrasi, Kebangsaan, dan Hak Asasi Manusia?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang kehidupan Mohammad Hatta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Mengetahui relevansi pemikiran politik Mohammad Hatta tentang konsep Demokrasi, Kebangsaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan kondisi pasca reformasi.

Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan penulis baik secara teori maupun praksis.
2. Memberikan pengetahuan bagi orang lain yang belum mengetahui tentang kajian ilmu yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dalam fokus kajian yang ada dalam penelitian.
4. Sebagai evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

D. Kerangka Dasar Teori

Dalam penelitian sosial, teori merupakan suatu hal yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendukung dan memecahkan permasalahan yang timbul. Masri Sangarimbun (Effendi, 1989: 37) dalam bukunya yang berjudul “ Metode Penelitian Survei “ memberikan definisi sebagai berikut:

Teori adalah serangkaian konsep, asumsi, definisi dan proposisi untuk menjelaskan fenomena sosial secara terukur yaitu dengan merumuskan hubungan antar konsep. Gambaran sistematis tersebut dijabarkan dengan variable lainnya, dengan tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena.

1. Pemikiran Politik

Teori ialah konsep yang saling berkaitan menurut aturan logika berubah menjadi bentuk pernyataan tertentu, sehingga mampu menjelaskan suatu fenomena secara ilmiah (Mas’oed, 1998: 161). Secara umum aspek-aspek teori dan telaah dalam perbandingan politik teori meliputi penyampaian pandangan dan pemikiran, teori-teori itu diharapkan bisa memberikan sebuah petunjuk. Dalam bentuknya yang sederhana, secara sistematis teori adalah serangkaian generalisasi dan prinsip-prinsip yang koheren (logis dan saling berkaitan) mengenai praktik atau sesuatu yang mejadi obyek telaah (*inquiry*). Segenap generalisasi dan prinsip ini bersifat hipotetis maupun konseptual. Deskripsi (*description*) adalah pernyataan mengenai bagian-bagian atau hubungan-hubungan dari

suatu hal, yang bisa dirumuskan melalui klasifikasi, identifikasi, dan spesifikasi. Analisis adalah pemisahan atau pemecahan suatu keseluruhan yang utuh menjadi bagian-bagian pokoknya, lalu masing-masing dikaji secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis bisa dilakukan dengan cara klasifikasi dan penjelasan rinci (*explication*). Sedangkan sintesis (*synthesis*) adalah penggabungan bagian-bagian menjadi satu keseluruhan utuh, atau dengan memadukan berbagai gagasan dan rumusan menjadi suatu kompleks atau kesatuan pemikiran yang keheren dan kohesif (Chilcote, 2003: 21).

Menurut (Budiarjo, 2003: 5) teori politik merupakan generalisasi dan bahasan dari suatu fenomena yang bersifat politik. Dapat dikatakan teori politik ialah bahasan dan renungan atas, a) tujuan dan kegiatan politik, b) cara-cara dalam mencapai tujuan, c) kebutuhan dan kemungkinan yang ditimbulkan oleh keadaan politik tertentu, d) kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Rancangan atau konsep-konsep yang berkaitan dengan teori politik mencakup antara lain masyarakat, kemerdekaan, negara, kedaulatan, kekuasaan, hak dan kewajiban, kelas sosial, lembaga-lembaga negara, dan perubahan sosial, pembangunan politik (*political development*), modernisasi dan sebagainya.

Dalam pandangan Thomas P. Jenkin, seperti yang dikutip Miriam Budiharjo, teori politik dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Mengandung nilai (*valuational*) yaitu teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik. Yang termasuk dalam golongan ini antara lain:

a. Filsafat politik

Filsafat politik merupakan hal yang diperoleh melalui penjelasan berdasarkan rasio. Dengan melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat kehidupan politik. Inti pemikiran dari filsafat adalah ialah masalah-masalah yang menyangkut alam semesta seperti epistemologi dan metafisika harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum persoalan yang dialami dalam kehidupan dapat ditanggulangi.

b. Teori politik sosial

Teori ini merupakan lanjutan dari filsafat politik yang mencoba untuk merealisasikan nilai atau norma itu dalam suatu program politik.

c. Ideologi politik

Nilai-nilai dan ide-ide politik adalah suatu sistem yang berpautan. Dasar dari ideologi politik merupakan keyakinan akan adanya suatu pola tata-tertib sosial politik yang ideal. Ideologi yang

berkembang atau yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang menjadikan dasar di mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan permasalahan politik yang dihadapinya, kemudian menentukan tingkah-laku politiknya.

2. Tidak mengandung nilai (*Non valuational*) teori ini menggambarkan dan membahas fenomena serta fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori ini bersifat deskriptif komparatif (membandingkan) yang berusaha membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

Mendefinisikan pemikiran politik dapat melihat masalah yang merujuk pada topiknya-topiknya, yaitu suatu pemikiran dengan tujuan untuk memberikan solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh "masyarakat politik". Untuk memahami masyarakat politik, pertama mengetahui apa itu masyarakat politik dan apa itu politik. Dikatakan masyarakat bila ia mempunyai sebuah lembaga kekuasaan yang khusus, yang bisa menetapkan hukum dan undang-undang, yang ia buat atau ia adopsi, yang mengatur perilaku masyarakat. Kemudian hukum dan undang-undang itu diaplikasikan kepada masyarakat dan memaksa mereka untuk mematuhi. Lalu undang-undang tersebut dipatuhi secara umum oleh masyarakat

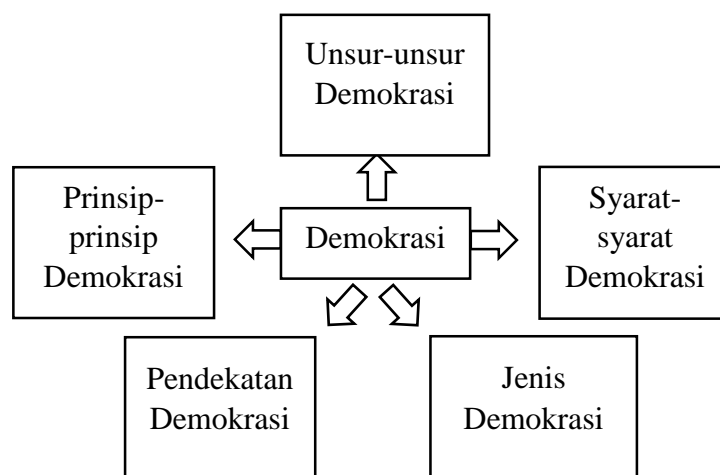
serta diakui mempunyai kekuatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam masyarakat yang dapat memberikan hukuman material. Dalam kamus Litre (1870) politik adalah ilmu memerintah dan mengatur negara. Dan dalam kamus Robert (1962) mendefinisikan politik sebagai seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia politik.

Secara umum pemikiran politik mengkaji kekuasaan tentang bagaimana sampai pada kekuasaan, cara mengatur, interaksi individu dengan kekuasaan. Ia juga mengkaji masalah Undang-Undang Dasar yang mengatur hubungan-hubungan organisasi antara lembaga-lembaga kekuasaan politik eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan mengkaji segi proses saling mempengaruhi antar lembaga-lembaga kekuasaan yang berkuasa dan aliran-aliran yang bergerak di tengah masyarakat yaitu partai, opini umum, perwakilan dan kepemilikan.

2. Demokrasi

Gambar 1.1

Demokrasi



Sumber: Sorensen, G. (2003). *Demkrasi dan Demokratisas (Proses dan Prospek dalam Dunia yang Sedang Berubah)*. (T. N. Effendi, Ed.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Berbicara mengenai demokarasi tentu mempunyai arti yang luas. Demokrasi secara etimologi berasal dari kata “*Demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*Cratein*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi *Demos-Cratein* atau demokrasi adalah keadaan negara dimana sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat (Syafiie, 2013: 151)

Dalam pengertian sempit demokrasi dirumuskan oleh Joseph Schumpeter (Sorensen, 2003: 14) mengatakan bahwa: Demokrasi dalam artian sederhana adalah suatu metode politik, yaitu sebuah mekanisme dalam memilih pemimpin politik yang mana warga negara mempunyai peluang untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang saling bersaing meraih suara. Kemudian pada pemilihan selanjutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan dalam memilih dari sekian banyak pemimpin-pemimpin politik pada titik pemilihan inilah yang dimaknai dengan demokrasi. Menurut Schumpeter demokrasi ialah sebuah penataan kelembagaan yang merupakan sebuah cara untuk sampai pada keputusan politik di

mana individu-individu yang mendapat kemenangan atau kekuasaan supaya mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara.

Dalam pengertian lain demokrasi secara komprehensif yang diusulkan oleh David Held (1987) yaitu pemaknaan demokrasi yang mendukung suatu prinsip dasar otonomi dengan menggabungkan pandangan pemahaman liberal dan tradisi Marxis. Held menyebutnya sebagai otonomi demokrasi (*democratic autonomy*), Dibutuhkan sebuah akuntabilitas negara dalam suatu derajat yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Otonomi demokrasi secara substansial langsung pada lembaga komunikasi lokal dan manajemen diri (*self-management*). Dalam Otonomi demokrasi sangat dibutuhkan adanya pernyataan dari hak asasi manusia (*bill of right*) di luar hak memilih untuk memberikan pengawasan akhir oleh warga negara terhadap ajang pesta politik.

Sehubungan dengan pemikiran Dahl (Sorensen, 2003: 14-18) berguna untuk mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang menekankan pada responsifitas pemerintah terhadap pilihan warga negaranya, yang setara secara politik, sebagai sifat dasar demokrasi. Responsifitas tersebut mensyaratkan warga negara memiliki kesempatan untuk: (1) merumuskan pilihannya, (2) kecerendungan yang ditunjukkan kepada warga-warga lain dan pemerintah melalui tindakan pribadi dan kolektif, serta (3)

memberikan beban yang sama terhadap mereka, yang dilakukan oleh warga negara. Ketiga hal di atas, pada gilirannya, tergantung pada beberapa jaminan syarat kelembagaan berikut ini :

1. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara.
2. Kebebasan berpendapat.
3. Kebebasan dalam membentuk dan menjadi anggota organisasi.
4. Hak memilih.
5. Mempunyai kesempatan menjadi pejabat pemerintah.
6. Hak untuk bersaing mencari dukungan politik.
7. Hak untuk bersaing dalam meraih suara.
8. Sumber informasi alternatif.
9. Pemilihan umum bebas dan adil.
10. Lembaga pembuat kebijakan pemerintah tergabung pada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya.

Dahl seperti yang dikutip oleh Sorensen (2003: 19-20) mengemukakan terdapat tiga prinsip utama demokrasi yaitu :

1. Kompetensi yang mencakup secara keseluruhan dan bermakna baik secara individu maupun kelompok organisasi secara khusus partai-partai politik pada

seluruh kekuasaan pemerintah yang efektif dan teratur tanpa penggunaan kekerasan.

2. Partisipasi dalam memilih pemimpin dengan melalui pemilihan bebas teratur, dan adil sehingga tidak ada golongan lain yang dirugikan.
3. Kebebasan dalam berpendapat, mendirikan atau menjadi anggota organisasi serta kebebasan pers. Prinsip demokrasi tersebut adalah persamaan, kebebasan dan kemerdekaan.

Dalam pandangan Sargent (1986:43-44) unsur-unsur demokrasi, meliputi :

1. Dalam membuat keputusan politik melibatkan warga negara
2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara.
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara.
4. Suatu sistem perwakilan.
5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Ciri yang paling mendasar dari setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa para warga negara patut terlibat dalam hal tertentu dibanding dengan pembuatan keputusan-keputusan politik baik

secara langsung maupun melalui para wakil pilihan mereka. Ada dua pendekatan utama atau jenis sebagai berikut:

1. Demokrasi langsung. Artinya warga negara berperan serta secara pribadi dalam pertimbangan-pertimbangan dan pemilihan atas sebagai masalah pokok untuk berdebat dan menegakkan hukum.
2. Demokrasi perwakilan. Artinya warga negara memilih warga lain untuk berdebat dan menegakkan hukum.

3. Kebangsaan

Bentuk peradaban manusia dalam perkembangannya menimbulkan interaksi-interaksi yang lebih kompleks dan dinamis. Mulai dari tumbuhnya kesadaran dalam menentukan nasib bangsa sendiri di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia. Di tengah-tengah situasi perjuangan dalam merebut kemerdekaan, selalu dibutuhkan suatu konsep yang matang sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikut sertakan semua orang atas nama sebuah bangsa. Sehingga sebagai dasar pembenaran tersebut, selanjutnya dapat menjiwai pada konsep paham ideologi kebangsaan yang disebut dengan nasionalisme.

Sebagai gejala historis nasionalisme atau paham kebangsaan Indonesia mempunyai peranan yang dominan dan tidak bisa dilepaskan dari situasi politik dalam abad ke-20. Cita-cita bersama dalam merebut kemerdekaan menjadi sangat umum dikalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk dapat memformulasikan bentuk nasionalisme yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (Azra, 2000: 24-25). Hal serupa terjadi secara dasar nasional modern pada negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Nasionalisme sebagai ideologi dilihat sebagai sebuah kesadaran nasional. Ideologi tersebut mempunyai kegunaan yang berorientasi pada politik bagi terbentuknya solidaritas di tengah-tengah masyarakat sehingga menjadi proses kesatuan komunitas politik.

Nasionalisme merupakan paham yang bisa datang baik dasar persamaan nasib atau atas dasar wilayah, dipandang sebagai perasan utama yang merupakan prinsip hidup secara individu atau secara umum. Nasionalisme bisa juga diartikan yang berarti patriotisme yang berarti prinsip moral dan politik atas kecintaan pada Tanah Air. Secara emosional merupakan ketersediaan diri untuk membela kepentingan-kepentingan bangsa. Nasionalisme yang terjiwai bersama-sama yang melibatkan emosi karena adanya rasa sepenanggungan atau senasib menjadi sebuah kesatuan yang historis. Nasionalisme secara ideologi pada kelompok merupakan

suatu cita-cita bersama yang akhirnya melegitimasi perilaku kelompok tersebut (Purwaningsih, 2009: 24-25).

Keberadaan nasionalisme merupakan ideologi politik tercipta sebagai ketahanan adanya paham imperialisme atau teknologisme yang secara realitas merupakan tandingan terhadap orientasi gerakan politik yang bertujuan untuk mewujudkan paham tersebut. Di samping gejala historis ketika sebuah bangsa terjajah nasionalisme difungsionalisasikan sebagai wujud solidaritas baru, jauh melampaui fungsi ikatan dasarnya. Dalam membentuk komunitas politik diperlukan guna menciptakan unitarisme dalam pluralisme, suatu revolusi integratif, maka secara struktural fungsional politik baru meningkatkan potensi kolektif sehingga adaptasi terhadap konstitusi secara kolektif dapat dilakukan baik dalam hal ekonomi, sosial dan politik. Kapasitas kolektif tersebut dapat digiatkan untuk menunjang derajat dan martabat komunitas, di sisi lain pihak adaptasi itu dapat meningkatkan kepastian ekonomi. Nasionalisme terasa di wilayah dunia ketiga. Nasionalisme menjadi bumerang moral ampuh dapat melegitimasi perjuangan kemerdekaan (Purwaningsih, 2009: 26).

Kehidupan nasionalisme Indonesia dapat dilihat dalam perjuangan-perjuangan para pendiri bangsa. Ketika penjajahan mendarat di Indonesia perlawanan dengan perjuangan secara fisik dilanjutkan masa revolusi menuntut kontinuitas di masa yang akan

datang, beserta prinsip-prinsip yang melekat di dalamnya membutuhkan semangat yang diwujudkan dengan perealisasiian atau pemantapan selama proses berlangsungnya pertumbuhan sebuah bangsa di Indonesia. Pertumbuhan tersebut secara fundamental dalam fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu proses sosialisasi yang membudayakan sehingga menjadikan etos bangsa dalam kepribadian seseorang serta kolektif para warga negara (Purwaningsih, 2009: 26)

Nasionalisme oleh Stanley Benn seperti yang dikutip oleh (Madjid, 2008: 37) ada lima hal : 1. Semangat kepada suatu bangsa semacam patriotisme, 2. Dalam aplikasinya kepada politik nasionalisme menunjuk pada kecenderungan mengutamakan kepentingan bangsa sendiri, khususnya jika kepentingan bangsa sendiri itu berlawanan dengan bangsa lain, 3. Sikap yang menunjukkan pentingnya ciri khusus suatu bangsa 4. Doktrin yang memandang perlunya kebudayaan bangsa untuk dipertahankan, 5. Nasionalisme adalah suatu teori politik, atau teori antropologi yang menekankan bahwa umat manusia secara terbagi-bagi menjadi berbagai bangsa, dan bahwa kriteria yang jelas untuk mengenai suatu bangsa beserta anggota bangsa itu.

Nasionalisme secara umum dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa.

Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari tangan kolonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara efektif oleh para penganutnya dan diakui sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi untuk mengetahui siapa kawan dan lawan. Menurut Larry Diamond dan Mrc F.Plattner, seperti yang dikutip (Azra, 2000: 24) para penganut nasionalisme dunia ketiga secara khas menggunakan retorika anti kolonialisme dan anti imperialisme.

4. Hak Asasi Manusia

Sudah sejak dalam kandungan manusia telah memiliki hak asasi, di mana setiap manusia memiliki sesuatu yang menjadi pokok atau dasar dari setiap diri masing-masing individu. Hak bisa diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau kepunyaan (milik), sedangkan asasi merupakan hal yang utama, pokok atau dasar. Dalam islam dikenal dengan hak-hak yang diberikan oleh Tuhan (Maududi, 2005: 10). Hak asasi manusia dapat diartikan hak-hak yang dimiliki setiap manusia sejak ia dalam kandungan, hak tersebut melekat di setiap manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa (Tuhan YME).

Hak pemilikan, penguasa dan pemerintah bukanlah suatu petumbuhan dengan sendirinya ada, hal tersebut berawal dari keinginan bersama orang-orang mencari kawan sesamanya untuk membentuk suatu masyarakat politik, yaitu masyarakat yang lepas

dari keadaan alami. Kekuasaan negara dibentuk justru untuk menjaga hak pemilikan individual. Hak ini merupakan bagian dari hak alamiah yang berada dalam diri setiap manusia. Hak pemilikan itu sangat memerlukan keamanan dari kemungkinan berbagai ancaman dalam konteks perjanjian sosial, maka warga individu harus rela menyerahkan hak-hak alamiah kepada pemegang kekuasaan yang dikenal sebagai *supremasi power*. Kemudian hak tersebut menjadi hak-hak rakyat yang meliputi hak hidup, hak memiliki kekayaan, hak bebas beragama. Oleh karena itu, semua manusia sama dalam arti semua memiliki hak yang sama untuk mempergunakan kemampuan mereka (Syam, 2010: 133-134).

Miriam Budiardjo (2001: 120-121) mengartikan hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa ada perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi manusia adalah bahwa manusia harus mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Sementara dalam keterangan lain yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt seperti yang dikutip Miriam Budiardjo, membagi empat macam hak-hak asasi yang dikenal dengan *The Four Freedoms* (Empat kebebasan), yaitu:

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat.
2. Kebebasan beragama.
3. Kebebasan dari ketakutan.
4. Kebebasan dari kemelaratan.

Gagasan Rooservert inilah yang kemudian menjadi satu hasil lahirnya Deklarasi Universal HAM. Deklarasi ini sifatnya mengikat bagi negara anggota Persyarikatan Bangsa-Bangsa, dibuktikan dengan perlunya negara-negara anggota PBB mengartifikasi hak-hak tersebut lewat Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah setempat di negara-negara masing-masing. Setelah ratifikasi otoritas negara memilik kewajiban untuk menjamin, menjaga, melindungi dan menjunjung HAM sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks Indonesia, sebagaimana negara yang menghormati HAM, Indonesia secara legal formal telah begitu banyak merartifikasi berbagai kesempatan-kesempatan PBB tentang HAM, serta banyak pula kesepakatan tersebut dalam sebuah aturan hukum nasional, di antaranya hak sipil politik (UU No 12 Tahun 2005), hak ekonomi, sosial, budaya (UU No. 11 Tahun 1985), adanya TAP No. XVII/MPR/1998 dan UU N0. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Khanif, 2016: 102-103). Di dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998/ di dalam konsideran menimbang mengatakan,“ bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat

dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Persyarikatan Bangsa-Bangsa serta sebagai instrumen internasional mengenai hak asasi manusia”(Handoyo, 2003). Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum. Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia.

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan suatu pengertian dari segala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konsepsional dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atas batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan.

a) Pemikiran Politik

Pemikiran politik adalah dengan melihat masalah dan topiknyatopiknya, yaitu macam pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat politik, kemudian mengkaji tentang bagaimana sampai pada kekuasaan, cara mengatur, interaksi individu dengan kekuasaan.

b) Demokrasi

Demokrasi adalah sistem politik di dalam bermasyarakat dan bernegara yang mana pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.

c) Kebangsaan

Kebangsaan adalah sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang tersebut secara langsung diabdikan total kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa.

d) Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia semenjak kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

F. Definisi Operasional

Di dalam definisi operasional peneliti dapat menggunakan acuan yang secara akademis bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Misalnya, peneliti dapat menggunakan definisi operasional yang telah banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya, yang diperoleh dari artikel-artikel ilmiah atau laporan ilmiah penelitian yang sudah terpublikasikan secara luas.

Dalam hal ini setiap variabel penelitian telah teridentifikasi dalam model penelitian seperti berikut :

1. Demokrasi Kerakyatan

a. Partai Politik

- b. Pers
- c. Masyarakat Madani
- 2. Nasionalisme
 - a. Nasionalisme
- 3. Hak Asasi Manusia
 - a. Konstitusi HAM

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan penelitian dengan taraf pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk menyimpulkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip kepastian mengenai suatu masalah.

Adapun hal ini metode penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam fokus kajian penelitian ini, jenis penelitian ini yang digunakan adalah studi pustaka. Kajian studi pustaka yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian isi teks dengan olahan filosofis teoritis. Bentuk kajian yang digunakan untuk mengetahui ide-ide dan pemikiran tokoh dan juga digunakan untuk mengetahui biografi dalam telaah historis. Dalam studi pustaka ini mengandalkan interpretasi dengan mengacu pada koleksi dokumentasi (data yang berupa teks) yang relevan dan analisis historis agar terbangun suatu pemahaman

interpretatif yang mendalam dan memadai mengenai relevansi konsep yang dikaji. Menurut Bekker (1986 :56) studi pustaka merupakan bagian kerangka penelitian historis faktual yaitu penelitian yang menekankan pada pemikiran orang lain. Berdasarkan hal tersebut, maka objek yang diteliti dalam metode ini misalnya berbagai aspek dari pemikiran tokoh yang diteliti, karya atau topik dari karyanya. Bekker menambahkan dalam paparannya lebih lanjut, bahwa dalam penelitian ini harus memperhatikan segi historis, yaitu mengenai latar belakang historis si tokoh, baik biografi dan pemikirannya. Susunan logis sistematis tokoh dan segi hermeneutik atau penerjemahan teks.

Berawal dari itu, langkah selanjutnya adalah mengadakan interpretasi dengan analisi atau menguraikan data-data untuk melihat pemikiran Mohammad Hatta dan konsep Demokrasi, Kebangsaan, dan Hak Asasi Manusia direlevansikan dengan kondisi pasca reformasi.

2. Unit Analisa

Unit analisa adalah suatu data terkecil yang merupakan objek nyata yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok pembahasan masalah dalam penelitian. Unit analisa data berisikan penegasan tentang kesatuan yang menjadi objek dan subjek penelitian. Dalam kegiatan penyusunan unit analisa data ini unit analisisnya adalah pihak-pihak yang mempunyai relevansi dengan pembahasan untuk dijadikan sumber data yang diperlukan. Dalam

penelitian ini yang menjadi unit analisa adalah pemikiran politik Mohammad Hatta tentang demokrasi, kebangsaan, dan hak asasi manusia dengan kondisi pasca reformasi.

3. Jenis Data

Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang diperoleh dari unit analisa yang dijadikan sebagai verifikasi empiris dalam kegiatan penelitian. Adapun data jenis-jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang lengkap dan segera diperoleh dari sumber data penyelidik dan segala atau hal-hal yang berkaitan dengan konsep penelitian yang kita peroleh secara kesaksian langsung yang bersumber dengan penulis di zamannya dari unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa sumber primer, sebagai berikut:

Hatta, B. (2000). *Karya Lengkap Bung Hatta (Kemerdekaan dan Demokrasi)*. Jakarta: PT Tema Baru.

Hatta, M. (2015). *MENDAYUNG DI ANTARA DUA KARANG*. Bandung: SEGAARSY.

Hatta, M. (2009). *Demokrasi Kita (Pikiran-pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat)*. Bandung: SEGAARCY.

Dari data tersebut penulis mengupulkan data sehingga menarik kesimpulan se-objektif mungkin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang diperoleh secara objektif tidak langsung mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa yang diperoleh sebagai objek penelitian. Data sekunder ini berkaitan dengan ahli-ahli sejarah yang menulis buku tentang Hatta dan sejarah yang berkaitan dengan kondisi pasca reformasi. Data yang diperoleh adalah literatur yang berupa kutipan dari media massa, buku-buku, internet, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian antara lain:

Hatta. (2016). *Jejak Yang Melampui Zaman*. Jakarta: PT Gramedia.

Bung Hatta (Pribadinya dalam Kenangan). (1980). In M. F. Swasono (Ed.). Jakarta: Universitas Indonesia.

- Meutia Farida Hatta, G. R. (2015). *Bung Hatta di Matta Tiga Putrinya*. (M. Karim, Ed.) Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Noer, D. (1972). *Mohammad, Portrait of a Patriot*. The Hauge Paris: Mouton.
- Noer, D. (1990). *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Hatta. (2016). *Jejak Yang Melampui Zaman*. Jakarta: PT Gramedia.
- Zulfikar, S. (2010). *Demokrasi Untuk Indonesia (Pemikiran Politik Bung Hatta)*. Jakarta: Kompas.
- Abdullah, T. (2010). *Mohammad Hatta Berjuang dan Dibuang*. Jakarta: Kompas.
- Alfarizi, S. (2009). *Mohammad Hatta Biografi Singkat (1902-1980)*. Yogyakarta: Garasi.
- Jonge, W. W. (2015). *Sukarno Hatta (Bukan Proklamator Paksaan)*. Yogyakarta: Percetakan Galangpress.
- Pane, N. (Ed.). (2015). *Mohammad Hatta Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- Hikam, M. A. (1999). *Demokrasi dan Clivil Society*.
Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia (Transisi Menuju Demokrasi)*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Erick Hiariej, U. M. (Ed.). (2004). *POLITIK TRANSISI PASCA SOEHARTO*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Khanif, A. (Ed.). (2016). *Pancasila Sebagai Realitas (Percik Pemikiran tentang Pancasila dan Isu-Isu kontemporer di Indonesia)*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Maarif, A. S. (1999). *Nasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Perpustakaan Yayasan Hatta.
- Madjid, N. (2008). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Mawdudi, M. A. (2005). *Hak-Hak Asasi Mansuia Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, A. (1977). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 1*. Bandung: Disjarah Angkatan darat dan Angkasa.

Rais, M. A. (2008). *Agenda Mendesak Bangsa (Selamatkan Indonesia)*. Yogyakarta: PT Mizan Publika

Samadhi, W. P. (Ed.). (2009). *Demokrasi di Atas Pasir*. Yogyakarta: PCD Press.

Saydam, G. (1999). *Dari Bilik Suara Ke Masa Depan Indonesia (Potret Konflik Politik Pasca Pemilu Dan Nasib Reformasi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sorensen, G. (2003). *Demkrasi dan Demokratisas (Proses dan Prospek dalam Dunia yang Sedang Berubah)*. (T. N. Effendi, Ed.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa penjelajahan pustaka (*library research*). Dalam teknik penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dengan membaca buku-buku dan semua data yang berkaitan dengan judul yang ditulis oleh penulis. Adapun data yang akan dipakai dalam penelitian ini, diperoleh dari sejumlah dokumen berupa :

- a. Penelitian pikiran dan keyakinan tokoh yang akan dibedah pemikirannya.
- b. Penelitian tentang biografinya sejak permulaan sampai akhir.

- c. Buku-buku yang ditulis oleh Mohammad Hatta.
- d. Buku-buku yang ditulis oleh ahli sejarah, ilmuwan, tentang Mohammad Hatta, serta komentar-komentar yang muncul dari tokoh-tokoh dalam artikel.
- e. Buku-buku yang ditulis oleh ahli sejarah, artikel yang berkaitan dengan pasca reformasi.

Dengan hal tersebut maka penulis dapat melakukan penelitian dan pembahasan dengan lebih mendalam dan lebih obyektif.

5. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut katagorinya masing-masing untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya gejala dianalisa menggunakan model analisa hermeneutika dalam pemahaman atau interpretasi. Menurut Wilhelm Dilthey (Howard, 2000: 178) hermeneutika adalah upaya memahami, secara kejiwaan, kelakuan orang lain serta karya ciptanya dengan upaya interpretif untuk memberikan makna kepada sesuatu yang dianggap pada hakikatnya bersifat “fakta objektif”.

Emilio Betti (1890-1968) menjelaskan bahwa tugas orang dalam melakukan interpretasi adalah menjernihkan persoalan

mengerti, yaitu dengan cara menyelidiki secara detail setiap proses interpretasi, dan kegiatan interpretasi yang merupakan proses triadik yang mempunyai tiga segi yang saling berhubungan yaitu tentang makna bukanlah diambil dari sebuah kesimpulan melainkan harus diturunkan.

Sementara hermeneutika menurut Hans Georg Gadamer (1900-2002) lebih merupakan usaha memahami dan menginterpretasikan sebuah teks. Hermeneutika berhubungan dengan suatu teks tertentu, dan berusaha kembali kesusunan tata bahasa. Dengan demikian, hermeneutika model Gadamera dalah keterbukaan terhadap yang lain, apapun bentuknya, baik teks, notasi musik maupun karya seni.